

Yuce-Sariningsih-UNPAS- Prosiding

by Ahmad Fauzi

Submission date: 29-Nov-2017 01:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2236838160

File name: Yuce-Sariningsih-UNPAS-Prosiding-Snija-2017.pdf

Word count: 5929

Character count: 37021

Identification of Potency and Problem in Empowering e-Warong KUBE at Cimahi City

Yuce Sariningsih dan Komang Monday Sari
Social Welfare Department Universitas Pasundan
*E-mail: yuceesp@unpas.ac.id

Abstrak - e-Warong KUBE is an electronic transaction model in business group for poor people which has been launched in 2016 aimed to reduce poverty level in Indonesia. This program facilitated economic transactions through the BNI program directed to residents receiving the Family Hope Program or Program Keluarga Harapan (PKH) in form of cashless and card models where the KUBE e-warong operators save money that is stored safely and can not be drawn to buy daily necessities. The objective of the study was to illustrate the potentials and problems within the SWOT framework and to identify the efforts undertaken to address the problem. The research method used qualitative approach applied in Cimahi City. The research informants were business actors of KUBE and business advisor as secondary informant. Data collection using in-depth interviews and observation, the results of the study has been analyzed qualitatively by considering memos and categorizations. Results showed that e-warong KUBE received full support from the government as the strength of the program, while the weakness was the dynamics of the static group, entrepreneurial spirit as well as low understanding of business management. Opportunities e-warong KUBE in the form of business development that not only channeling aid funds for beneficiaries but also expansion of other types of business, while the threat was a low cohesiveness resulting in the group threatened to disperse. Recommendations was directed to stakeholders in order to give some contribution to reach their goal and improve entrepreneurship spirit.

Keywords: Poverty, e-warong KUBE, cashless, business advisor, entrepreneurship

I. PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah utama pada tingkat nasional yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi landasan Kementerian Sosial untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun 2003. Program ini ditujukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk program pemberdayaan fakir miskin melalui pola terpadu antara KUBE dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif fakir miskin melalui KUBE ditujukan untuk meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar, melaksanakan usaha kesejahteraan dan menjalin kemitraan ekonomi dengan berbagai pihak terkait. Kegiatan dilaksanakan dalam

bentuk penguatan modal usaha bergulir, fasilitas sarana dan prasarana usaha ekonomi, fasilitas perbaikan rumah tidak layak huni, dan santunan hidup yang disalurkan secara langsung atau melalui mekanisme perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar keberhasilan aspek sosial KUBE berada pada kategori sedang. Indikator aspek sosial yang digunakan meliputi : (a) kerjasama sesama anggota, (b) kesediaan memberi pertolongan, (c) kemampuan mengatasi masalah, (d) tingkat partisipasi anggota, (e) keberanian menghadapi resiko, (f) perencanaan usaha, (g) pemanfaatan sumber daya, dan (h) inovasi yang dilakukan. Sebagian besar aspek ekonomi KUBE berada dalam kategori sangat rendah. Indikator aspek ekonomi yang digunakan meliputi: (a) perkembangan modal usaha, (b) pengguguran yang dilakukan, (c) pendapatan, (d) tabungan anggota, (e) banyaknya jenis usaha yang dikembangkan, (f) pengelolaan hasil keuntungan dan (f) pengelolaan IKS. (Tampubolon, Sugihen, Slamet, Susanto dan Sumardjo, Jurnal Penyuluhan, Juni 2006, Vol. 2, No. 2).

Aspek ekonomi menjadi kendala yang berarti dalam pengembangan usaha. Hasil penelitian lain yang menunjang permasalahan tata kelola KUBE menunjukkan bahwa responden: (1). Kurang kreatif, inovatif dan keterampilan yang rendah. (2) Tingkat kemampuan permodalan dan kemampuan pemasaran hasil usaha masih perlu ditingkatkan. (3) Kinerja yang rendah. (4) Belum tercapainya taraf kesejahteraan yang lebih baik. (5) Terdapat pengaruh yang signifikan dari kreativitas, inovasi dan keterampilan terhadap kemampuan permodalan secara parsial maupun simultan. (6) Terdapat pengaruh yang signifikan dari inovasi, kreativitas dan keterampilan terhadap kemampuan pemasaran secara parsial maupun simultan. (7) Terdapat pengaruh yang signifikan dari kemampuan permodalan serta kemampuan pemasaran terhadap kinerja secara parsial maupun simultan. (8) Terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja terhadap kesejahteraan (Sariningsih: 2011, dim.com).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi KUBE maka digagas e-warong KUBE oleh Kementerian Sosial bersama beberapa Bank BUMN dengan model *cashless* dan kartu, pelaku e-warong KUBE memiliki uang yang tersimpan aman dan tak mungkin berkurang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Peluncuran e-warong dilatarbelakangi permasalahan penyaluran bantuan sosial yang tak tepat sasaran, baik secara kuantitas, kualitas, dan

waktu. Seperti adanya budaya '*Bagito*' atau bagi rata yang terjadi di Jatim dan Jateng (Khofifah: 2016, kompas.com).

Data yang berkaitan dengan efektifitas e-warong KUBE menunjukkan bahwa layanan elektronik warung kelompok usaha bersama (e-Warong KUBE) yang diluncurkan sejak Oktober 2016 lalu belum bisa dioperasikan secara maksimal. Sampai saat ini program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial belum berjalan dan diperkirakan e-warong ini akan mulai efektif berjalan mulai Februari 2017 atau Maret 2017 mendatang. Di Cimahi sendiri dengan jumlah yang masuk PKH sebanyak 18.000 kepala keluarga, maka setidaknya harus ada sebanyak 19 (sembilan belas) e-warong untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. e-warong merupakan program konversi dari subsidi raskin menjadi bantuan pangan non tunai (Tri Laksmi Hindayani: koransindo.com/news.php?r=6&n=110&date=2017-01-13).

Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Menggambarkan potensi dan masalah dalam kerangka analisis berdasarkan *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat* dan 2) Identifikasi upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan e-warong KUBE.

e-Warong KUBE merupakan salah satu pengembangan program dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dapat dikategorikan sebagai Program Bantuan Non Tunai, yang merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program serta mendorong inklusi keuangan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (2016:4) dinyatakan bahwa: "Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan warung yang bekerjasama dengan bank".

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan melalui sistem perbankan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dibantu oleh perbankan yang menjadi agen penyalur bantuan. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai adalah bank mitra kerja Pemerintah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara non tunai.

Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada KPM melalui Kartu Kombo yang merupakan instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Bahan pangan yang disalurkan kepada KPM adalah beras dan telur. Proses konversi

Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan di e-Warong atau agen penyalur. e-Warong adalah istilah yang digunakan dalam Program Bantuan Non Tunai yang menyebutkan agen bank. Pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontongan, e-Warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya".

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang dilakukan oleh agen e-Warong KUBE dikelola secara berkelompok dengan 10 orang anggota yang tergabung dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terverifikasi sebagai penerima bantuan pangan non tunai dan telah memiliki kartu kombo atau kartu BISA.

Prinsip dari program Bantuan Non Tunai adalah mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi. Secara khusus, tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pentunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai (2016:6) yaitu:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 2) Memberikan nutrisi yang lebih seimbangan kepada KPM.
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
- 4) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 5) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).

Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan segala bentuk kemudahan dan keefektifannya diharapkan mampu memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi KPM. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai meliputi:

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
- 4) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

Tujuan dari e-warong KUBE adalah untuk mencapai pemberdayaan ekonomi anggotanya dengan meningkatnya kemampuan dalam memanfaatkan sumber dan kekuatan yang dimilikinya, dan juga menitikberatkan pada peningkatan jiwa kewirausahaan sehingga mampu memberdayakan diri sendiri dan keluarganya.

The process of helping individuals, families, groups and communities to increase their personal, interpersonal, socioeconomic, and political strength and to develop influence toward improving their circumstances (Zastrow: 2015). Pemberdayaan meliputi meningkatnya kemampuan individu, keluarga, kelompok dan komunitas dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Empowerment is an increasing the decision making discretion of individuals (Coulter: 2000). Keberdayaan bukan berarti mengambil keputusan sendiri, tetapi hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan KUBE sebagai suatu organisasi.

II. METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang "Identifikasi Potensi dan Masalah dalam Pemberdayaan e-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Cimahi" ini adalah metode kualitatif dengan mengadakan wawancara dan observasi kepada informan dan pendamping sosial serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

B. Objek Penelitian dan Informan Penelitian

Objek penelitian adalah KUBE pada Rukun Warga (RW) 04 Kebon Manggu Kelurahan Cimahi Utara. Jenis usaha yang dijalankan KUBE adalah KUBE warungan, yang mendapat dana pengembangan usaha dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 20.000.000,-/kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 orang pelaku usaha KUBE.

Lokasi e-warong KUBE adalah rumah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai kondisi pekerjaan dan rumah yang lebih baik. Informan adalah pelaku ewarong KUBE terutama ketua sebagai informan kunci dan pendamping sosial.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

- 1) Studi Dokumentasi; Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek peneliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran, artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- 2) Observasi; Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.
- 3) Wawancara mendalam; Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada pembimbing KUBE dan pihak lain yang relevan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mempertimbangkan catatan (memo) dan kategorisasi data yang diperoleh. Validitas menggunakan triangulasi data yang disandingkan dengan teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Pada tahun 1901 Cimahi dibentuk sebagai kewedanaan yang meliputi 5 kecamatan yaitu Cimahi, Padalarang, Batujajar, Cipatat, dan Cisarua. Selanjutnya Cimahi sebagai bagian dari Kabupaten Bandung, menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan sehingga yang semula berstatus Kewedanaan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Kotif).

Sejak tahun 1975 Kotif Cimahi telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama disebabkan oleh letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Kotif Cimahi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategi, baik dari segi ekonomi, maupun sosial budaya.

Potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan mempunyai prospek yang baik bagi 69 peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kotif Cimahi perlu dibentuk menjadi Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Thn. 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, maka pada 21 Juni 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.



Sumber: Dinsos Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi 2017.

Gambar 1. Peta Kota Cimahi

Gambaran perkembangan jumlah penduduk secara umum di Kota Cimahi dari tahun 2014-2015 cukup pesat, tetapi dapat menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan penduduk melalui pengembangan kegiatan KUBE, perkembangan penduduk digambarkan pada Gambar 2.

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi dengan tingkat kepadatan penduduk yang berpusat terdapat pada pusat kota Cimahi yaitu di Kecamatan Cimahi Tengah, yang menyebabkan Kota Cimahi juga mengalami permasalahan yang dialami oleh kota-kota besar di Indonesia seperti masalah kemiskinan dan pengangguran. Luas wilayah dengan jumlah penduduk kota Cimahi mengalami ketimpangan atau ketidakseimbangan sehingga berimbas pada tingginya

angka kemiskinan dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga.



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2016

Gambar 2. Perkembangan Penduduk Kota Cimahi tahun 2014-2015



Sumber : BPS Kota Cimahi, 2016

Gambar 3. Angka Kemiskinan di Kota Cimahi 2016

Angka kemiskinan di Kota Cimahi pada tahun 2016 berda di angka 31.700 orang atau 5,47% dari jumlah Penduduk Kota Cimahi yang berada di angka 586.580 jiwa pada tahun 2015. Angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa kota Cimahi juga tidak terlepas dari masalah sosial kemiskinan yang sangat kompleks dengan luas wilayah yang tergolong padat penduduk. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kota Cimahi untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya yaitu pelaksanaan program-program yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial republik Indonesia yaitu Program Kelompok Usaha Bersama, Program Keluarga Harapan dan Program e-Warong KUBE PKH yang digulirkan sejak tahun 2006.

Jumlah data penerima bantuan KUBE di Kota Cimahi adalah 250 warga, yang tersebar di wilayah Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Data yang berkaitan dengan jumlah peserta KUBE dijelaskan Tabel 1.

Pada tahun 2016, Kota Cimahi terpilih untuk menjadi pelaksana bantuan pangan non tunai, sehingga kemudian dibentuk e-warong KUBE sebagai perluasan dari program KUBE yang telah berlangsung sejak tahun 2003, yang anggotanya adalah peserta Program Keluarga Harapan, dengan ketua kelompok adalah pemilik outlet warungan.

Tabel 1. Daftar KUBE Bantuan Kemensos di Kota Cimahi TA 2014

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis usaha
1	Taruna Karya	RT 03 RW 04 Kel. Melong	Konveksi
2	Sawargi	RT 02 RW 07 Kel. Melong	Olahan Pangan
3	Mohicand Mind	RT 02 RW 14 Kel. Melong	Asesoris
4	Nusa Indah	RT 04 RW 17 Kel. Melong	Catering/Olahan Pangan
5	Sawargi 21	RT 03 RW 21 Kel. Cibeureum	Konveksi
6	Karangsari	RT 03 RW 03 Kel. Cibeureum	Bakpia
7	Rancabentang	RT 04 RW 14 Kel. Cibeureum	Konveksi
8	Harapan Maju	RT 02 RW 01 Kel. Cibeureum	Es Goreng
9	Raos Mandiri	RT 02 RW 15 Kel. Cipageran	Catering
10	Saluyu Mandiri 07	RT 02 RW 07 Kel. Cipageran	Olah Pangan Keripik Pisang
11	Cimekar Mandiri	T 01 RW 29 Kel. Cipageran	Warungan
12	Sawah Lega Mandiri	RT 02 RW 02 Kel. Cipageran	Warungan
13	Tulip Mandiri	RT 02 RW 18 Kel. Citeureup	Warungan
14	Sedap Malam	RT 03 RW 03 Kel. Citeureup	Warungan
15	Saluyu Mandiri	RT 05 RW 10 Kel. Citeureup	Ternak Lele
16	Sawarfi Mandiri	RT 04 RW 09 Kel. Citeureup	Catering/Oleh Pangan
17	Pawon Sawargi	RT 01 RW 11 Kel. Baros	Catering
18	Motekar	RT 03 RW 06 Kel. Baros	Ternak Lele
19	Sawargi	RT 04 RW 06 Kel. Baros	Catering/Kue Basah
20	Sugema	RT 01 RW 11 Kel. Baros	Menjahit
21	Kenari	RT 03 RW 16 Kel. Baros	Ternak Burung
22	MGM	RT 08 RW 01 Kel. Cimahi	Olahan Bakso
23	Animas	RT 02 RW 07 Kel. Cimahi	Abon Ikan Mas
24	Pista	RT 07 RW 01 Kel. Cimahi	Ternak Burung
25	Tunas Mekar	RT 04 RW 02 Kel. Cimahi	Warungan/Olah Pangan

Sumber: Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, 2016

B. Profil Informan

Informan adalah pengelola e-warong KUBE, petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yang bekerja secara sinergi untuk kegiatan penyaluran bantuan pangan non tunai dan melaksanakan pendampingan sosial dan ekonomi untuk pencapaian kinerja e-warong yang

lebih baik. e-Warong adalah istilah yang digunakan dalam Program bantuan Pangan Non Tunai untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya (Kemensos, Pedoman Pelaksanaan, Bantuan Pangan Non Tunai, 2017) E-Warong KUBE terdiri dari para penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemilik *outlet* adalah salah satu anggota yang dinilai telah berhasil dan tidak mendapat bantuan PKH lagi.

Tabel 2 Daftar Outlet Non PKH di Kecamatan Cimahi Tengah

No	Nama Outlet	Alamat	Keterangan
1	Agen Suryo 269103223	Abd Halim RT 01 RW 03	KPM 213 Beras 4260 kg Gula 852 kg
2	Agen Mulyadi 269103564	RT 02/RW 03 Cigugur	KPM 178 Beras 3560 kg Gula 712 kg
3	Sri Rejeki 269103263	08985816667	KPM 250 Beras 2000 kg 4Gula 1000 kg
4	Renti Sormin 269103278	-	KPM 438 Beras 8760 kg Gula 1752 kg
5	Tynna 26996893	085624109897	KPM 323 Beras 6460 kg Gula 1292 kg
6	Siti Sawaliah 26998028	022-6647675	KPM 142 Beras 2840 kg Gula 568kg
7	e-Warong KUBE Merah Dahlia 269109033	085221180795	KPM 151 Beras 3020 kg beras Gula 604 kg
8	Dadan S.	0811249461	KPM 148 Beras 2960 kg Gula 592 kg
9	Basarudin 269103272	081224375069	KPM 178 Beras 3560 kg Gula 712 kg
10	Bandi 269103539	089656609939 081394348070	KPM 163 Beras 3260 kg Gula 652 kg
11	Wendi 26903225	082218180855	KPM 140 Beras 2800 kg Gula 560 kg
12	Dede S 269103277	087825624577	KPM 90 Beras 1800 kg Gula 360 kg
13	Suprikatun 269103243	-	KPM 140 Beras 2800 kg Gula 560 kg

Sumber: Dinas Sosial Kota Cimahi, 2017

KPM pada tabel 3.2 adalah Keluarga Penerima Manfaat, yang pada tahun 2017 adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. DT-PFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data), yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016. Pokja data terdiri dari:

- 1) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri).
- 2) Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas).
- 3) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- 4) Kementerian Sosial (Kemensos)
- 5) Badan Pusat Statistik (BPS).
- 6) Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Daftar *outlet* non PKH yang melayani bantuan pangan non tunai untuk jangka waktu 2 (dua) bulan, dengan perhitungan beras sebanyak 4 kantong @5 kg, dan gula 4 kantong @1kg disajikan dalam Tabel 2.

e-Warong KUBE Merah Dahlia adalah salah satu *outlet* yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial sebagai penyalur bantuan pangan non tunai. Outlet lainnya mewakili Bulog dengan nama kelompok *outlet* Rumah Pangan Kita (RPK), dan Agen yang mewakili BNI.

C. Persiapan e-Warong KUBE

Setelah Bank Penyalur mengetahui jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di masing-masing lokasi penyaluran bantuan, Bank Penyalur mengidentifikasi pedagang dan agen untuk selanjutnya data menjadi e-warong penyalur Bantuan Pangan Non Tunai pada masing-masing lokasi tersebut. Penetapan e-warong dilakukan sesuai ketentuan Bank dengan mempertimbangkan kriteria yang diperlukan sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai. E-warong penyalur Bantuan Pangan Non Tunai harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (*due diligence*) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank Penyalur.
- 2) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- 3) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
- 4) Menjual bahan pangan paling tidak mencakup beras atau telur sesuai harga pasar. Dalam hal ini, jumlah e-warong lebih dari 1 (satu) di masing-masing wilayah

kelurahan/desa untuk menghindari adanya penetapan harga di atas harga wajar.

- 5) Dapat melayani KPM dan Non KPM Kriteria yang telah disebutkan di atas berdasarkan hasil penelitian masih belum dapat dipenuhi, dalam hal ini e-warung KUBE belum mempunyai penghasilan tetap, sehingga warung selalu tutup dan anggota masing-masing melaksanakan usaha sendiri. Keadaan ini dijelaskan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 4. E-Warung KUBE Merah Dahlia

Di samping kriteria pembukaan dan penyelenggaraan e-warung KUBE, terdapat hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur terkait e-warung yang meliputi:

- 1) Memastikan jumlah dan sebaran e-warung yang menjual beras atau telur di setiap lokasi penyaluran memadai, sehingga tidak menimbulkan antrian penerima manfaat yang panjang dan lama saat melakukan transaksi. Rasio e-warung berbanding KPM yang dipergunakan adalah 1:150, dan dalam satu kelurahan terdapat minimal 2 (dua) e-warung.
- 2) Memberikan layanan perbankan kepada e-warung, termasuk di antaranya pembukaan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai atau Lembaga Keuangan Digital, pemberian kredit usaha, dan layanan usaha lainnya.
- 3) Bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan upaya edukasi, pemasaran/*branding*, perbaikan fasilitas *outlet* e-warung dan lainnya untuk melayani KPM.
- 4) Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian Bahan Pangan dengan menggunakan kartu Kombo (alat pembayaran elektronik bantuan pangan non tunai), termasuk:
 - Menyediakan mesin pembaca kartu Kombo dapat berupa EDC/ Smartphone/ Mobile Pos Device/ Tablet/ NFC reader/ biometric reader yang diberikan kepada e-warung untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM.
 - Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu Kombo kepada e-warung dan memastikan e-warung siap melayani KPM.
 - Bekerja sama dengan pihak lain (Prinsipal, Perusahaan Switching) dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Pangan untuk memastikan cakupan layanan dan pengertian penggunaan kartu Kombo.

- Melakukan dukungan teknik dan pemantauan berkala terhadap kelancaran alat transaksi.

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang bekerjasama dengan Bank Penyalur untuk memproses transaksi pembelian bahan pangan melalui sistem dan/atau jaringan antar anggotanya dalam transaksi alat pembayaran elektronik. Sedangkan perusahaan *switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi yang menggunakan alat pembayaran elektronik melalui terminal seperti ATM atau mesin pembaca kartu lainnya.

E-warung harus mampu berkomunikasi dengan prinsipal dan lembaga selain bank sehingga terbuka kemungkinan pengembangan usaha. Di samping itu pemilik *outlet* harus mempunyai kreativitas untuk menjaga agar warung tetap buka, dan memperluas jaringan usaha agar bisa melayani pembeli non Keluarga Penerima Manfaat (KPM). E-warung akan menjadi penyalur 10 kg beras dan 2 kg gula kepada KPM yang nilainya setara dengan Rp. 110.000,-. Jika terdapat selisih nilai jumlah nominal bantuan dengan nilai bantuan pangan maka selisih akan tersimpan pada rekening KPM. E-warung akan menerima Rp. 2.600./KPM dan e-warung Merah Delima melayani 151 KPM, sehingga setelah pembagian bantuan pangan non tunai akan mendapatkan keuntungan Rp. 392.600,- yang akan dijadikan modal pengembangan usaha.

Pagu jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai merupakan besaran jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai, dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi pagu bantuan pangan non tunai nasional. Pagu bantuan pangan non tunai untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Penerima Bantuan Pangan Non Tunai bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam DPM. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan mekanisme penyaluran sama dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Gambar 5 adalah pengurus e-warung KUBE berdiri di depan e-warung dengan latar belakang *outlet* e-warung KUBE yang masih kosong karena bahan sembako sebagai bantuan non pangan belum datang. Warung nampak tidak beroperasi dan tidak ada *stock* bahan pangan ataupun bahan lain yang dijual di warung tersebut.

E-Warung belum mendapat *dropping* bantuan non pangan pada awal bulan Juni 2017 saat penelitian ini berlangsung. Keterlambatan ini sangat berpengaruh pada program pembinaan e warung KUBE berikutnya sehingga kondisi warung tidak beroperasi dan selalu dalam keadaan tertutup. Bantuan pangan non tunai untuk pemenuhan bantuan selama 2 bulan untuk bulan Juli dan Agustus 2017 diberikan kepada KPM pada 24 Agustus 2017.



Gambar 5. Pengurus e-Warong KUBE

D. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi diperlukan untuk memperlancar penerimaan bantuan pangan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat. Tujuan sosialisasi dan edukasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
- 2) Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non Tunai.
- 3) Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Sasaran kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bantuan pangan non tunai kepada pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Kementerian
- 2) Pemerintah Daerah, termasuk Tikor Rastra Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kota.
- 3) Kecamatan
- 4) Kelurahan
- 5) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- 6) Ketua atau Pengurus RT/RW
- 7) KPM
- 8) e-warong (warung, toko, kelontong, koperasi, RPK, e-warong KUBE, dll)
- 9) Masyarakat umum.

Bentuk media sosialisasi dan pesan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bantuan pangan non tunai objek adalah sebagai berikut:

- 1) Surat yang dikirim oleh Menteri Sosial kepada:
 - a. Kementerian/Lembaga terkait dan Gubernur tentang kebijakan, program dan jumlah sasaran.
 - b. Walikota tentang Kebijakan, program, jumlah sasaran, informasi mengenai Daftar Penerima Manfaat (DPM), serta rentang waktu pelaksanaan pendaftaran Penerima Manfaat.
 - c. KPM tentang informasi singkat dan kepesertaan dalam program.
- 2) Pedoman Umum Subsidi Rastra dan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai 2017; berisi informasi lengkap mengenai program secara umum

dan mekanisme pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 3) Lembar panduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM); berisi informasi mekanisme pemanfaatan bantuan Pangan Non Tunai dan Pengaduan, ditujukan kepada KPM.
- 4) Poster:
 - a. Berisi informasi tentang program secara umum yang mencakup tujuan, sasaran dan manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai, ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat Umum.
 - b. Berisi informasi mengenai mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan pengaduan, ditujukan kepada RT/RW, Kelurahan, KPM dan e-warong.
- 5) Lembar daftar e-warong; berisi informasi nama dan lokasi e-warong yang menjadi tempat pencairan Program Bantuan Pangan Non Tunai dari bank Penyalur, ditujukan kepada RT/RW, Kelurahan dan PKM.
- 6) Audio; berdurasi 1 menit, berisi informasi tentang program secara umum yang mencakup tujuan, sasaran dan manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai, ditujukan kepada masyarakat umum.
- 7) Video:
 - a. Berisi informasi tentang program secara umum yang mencakup tujuan, sasaran dan manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai, ditujukan kepada masyarakat umum.
 - b. Berisi informasi (video tutorial berdurasi ±3 menit) tentang mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, ditujukan kepada KPM melalui Kelurahan.
 - c. Siaran Pers: berisi informasi tentang program secara umum yang mencakup tujuan, sasaran dan manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai, ditujukan kepada masyarakat umum.

Media sosialisasi yang digunakan pada kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bantuan pangan non tunai objek adalah sebagai berikut:

- 1) Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya, dan diskusi
- 2) Komunikasi tatap muka/kelompok
- 3) Media cetak (poster, selebaran, surat kabar, dll)
- 4) Media elektronik (radio, televisi lokal, dll)
- 5) Media sosial (Website resmi K/L, Twitter, FB, Blog dan microsite).
- 6) Petugas Kelurahan dan/atau RT/RW.
- 7) Siaran Pers (di beberapa kota terpilih yang memiliki potensi menjadi berita nasional).

Sedangkan pelaksanaan sosialisasi tentang bantuan pangan non tunai objek adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah; sosialisasi dilakukan pemerintah secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- 2) Bank penyalur
- 3) E-warong

Tabel 3. Hasil Analisis SWOT pada e-Warong KUBE

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)	Kelemahan (Weakness)
1. Dukungan dana sebesar Rp. 20.000.000, /KUBE 2. Dukungan kebijakan dari Kementerian Sosial RI 3. Jiwa gotong royong pada setiap kelompok 4. Program memiliki tujuan: 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. 2) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM. 4) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. 5) Mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>) 5. Program memiliki manfaat: 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2) Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). 4) Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. 5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. 6. Prinsip Umum: 1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM 2) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan preferensi 3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM 4) Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM	1. Kualitas dinamika kelompok rendah 2. Rendahnya pengetahuan tentang kewirausahaan 3. Rendahnya jiwa kewirausahaan (kreativitas dan inovasi) 4. Rendahnya akses permodalan 5. Rendahnya kemampuan pemasaran produk 6. Produktivitas rendah 7. Keterampilan anggota e-warong KUBE yang bervariasi sehingga menjadi masalah dalam mengelola toko/ <i>outlet</i> secara bersama-sama. 8. Transaksi non tunai belum familiar bagi KPM 9. Waktu memperoleh bantuan sering terlambat. 10. Kualitas bahan pangan (beras dan telur) rendah 11. E-warong KUBE lebih banyak tutup, kunci ruangan tidak diberikan kepada anggota, sehingga anggota menjalankan usaha secara perorangan 12. Usaha eceran rakyat untuk melayani KPM belum berkembang 13. Akses jasa keuangan kepada KPM belum berkembang.
Kesempatan (Opportunity)	Ancaman (Threat)
1. Menjalinkan kemitraan usaha dengan perusahaan melalui program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> 2. Pengembangan modal usaha dari perbankan 3. Meningkatkan kualitas dinamika kelompok 4. Meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan 5. Meningkatkan jiwa kewirausahaan (kreativitas dan inovasi) 6. Meningkatkan akses permodalan 7. Meningkatkan kemampuan pemasaran produk 8. Meningkatkan Produktivitas 9. Meningkatkan kemampuan KPM dalam melakukan transaksi non tunai 10. Meningkatkan pelayanan penyaluran bahan pangan (beras dan telur) tepat waktu dan berkualitas. 11. Menjadi agen pembayaran listrik, PAM dan telepon serta penjualan pulsa 12. Mengembangkan akses jasa keuangan kepada KPM	1. Kohesivitas kelompok yang rendah mengakibatkan kelompok terancam bubar. 2. Dana bantuan belum memberi manfaat optimal 3. Peluang usaha dimanfaatkan oleh pihak lain yang bukan anggota e-warong KUBE.

E. Hasil Analisis SWOT

Penelitian tentang “Identifikasi Potensi dan Masalah dalam Pelaksanaan e- Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Cimahi” menggunakan analisis SWOT untuk mengungkap potensi dan masalah, sehingga dapat memunculkan upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan e-warong KUBE. Gambaran tentang hasil analisis SWOT yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, dijelaskan dalam bentuk Tabel 3. Upaya mengatasi masalah KUBE e-warong harus terintegrasi antara pihak Kementerian Sosial, Bank penyalur dan pengembangan mitra termasuk perusahaan yang dapat membantu memberi bantuan modal usaha. Sampai saat ini upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi e-warong KUBE belum banyak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping PKH selalu menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan:
 - a. Terdapat pendampingan usaha bagi e-warong KUBE.
 - b. Kemungkinan Perluasan jenis usaha pada e-warong KUBE dengan menerima pembayaran PAM, telepon, listrik dan penjualan pulsa, sehingga dapat menambah penghasilan e-warong KUBE.

E-Warong KUBE sebagai agen bank juga melayani penjualan bahan pangan untuk umum, dan tetap dijaga agar warung tetap buka dengan mengoptimalkan potensi keterampilan yang dimiliki oleh anggota e-warong KUBE.

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Program Bantuan Pangan secara non tunai yang dikelola oleh e-warong KUBE mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di beberapa daerah terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Penyaluran manfaat raskin dilakukan melalui kupon elektronik (*e-voucher*), sehingga diharapkan penyampaian bantuan non tunai lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. *E-voucher* ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya, sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan.

- 1) Dimensi Kekuatan (*Strength*) pada e-Warong KUBE: Program e-warong mendapat dukungan dari Kementerian Sosial RI dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif. Melalui penggunaan sistem perbankan diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpanan. Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, rastra diamankan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial (pangan).
- 2) Dimensi Kelemahan (*weakness*) pada e-Warong KUBE: Pencapaian tujuan program Bantuan Pangan secara non tunai tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang harus diantisipasi. Kelemahan tersebut berkaitan dengan

dinamika kelompok pada KUBE setelah menjadi e-warong, jiwa kewirausahaan pelaku e-warong KUBE serta pendamping sosialnya, akses permodalan, akses pemasaran, produktivitas, aspek teknis pelaksanaan program, kualitas bahan pangan serta pengetahuan tentang akses jasa keuangan

- 3) Dimensi Kesempatan (*Opportunity*) pada e-Warong KUBE: Program Bantuan Pangan Non Tunai memberi kesempatan kepada pelaku usaha e-warong KUBE untuk berkembang, dengan penerima manfaat adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Jumlah penduduk dengan kondisi demikian masih tinggi di Indonesia, sehingga menjalin mitra dengan Pemerintah dan Perusahaan menjadi salah satu alternatif KUBE untuk maju.
- 4) Dimensi Ancaman (*Threat*) pada e-Warong KUBE: Ancaman terbesar adalah karena lemahnya dinamika kelompok dapat mengakibatkan keberadaan e-Warong KUBE terancam bubar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang identifikasi dan potensi serta permasalahan e-warong KUBE dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- 1) Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat
 - a. Pendamping sosial dan pendamping PKH harus mendapatkan pengayaan pengetahuan tentang manajemen bisnis dan kewirausahaan untuk menjaga agar warung tetap buka dan memberi pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Dinas sosial menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan secara berkala kepada pelaku e-warong KUBE untuk menjalankan usaha e-warong dan mendapat inspirasi pengembangan usaha
- 2) Akademisi
 - a. Pihak akademisi dapat melaksanakan penelitian untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan e-warong KUBE dan merespon pengaduan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai, serta mencari solusi terbaik untuk peningkatan kinerja.

Pihak akademisi dapat melaksanakan pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat.

REFERENSI

Electronic Source:

- Hornby, A.S. 2010. *Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th edition*. New York: Oxford University Press
- Primiana, Ina. Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, 2009, Alfabeta, Bandung.
- Robert Hisrich, Candy Brush. 1994. *The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems*. *University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship* .



*Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jenderal Achmad Yani (SNIJA) 2017
Cimahi, 20 Desember 2017
ISBN: 978-602-429-130-3*

- Swasono, Sri Edi. 2017. Ekspose Ekonomika, Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas. Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila.
- Swasono, Sri Edi. 2015. KeIndonesiaan, Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian. Jogjakarta: Universitas Sarjanawiyata.
- Mel, Gray & Healy, Karen & Crofts, Penny. 2003. *Sosial Enterprise: is it the business of Sosial Work?* DOI: 10.1046/j.0312-407X.2003.00060.x
- Wilantara, Rio F., Susilawati, Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM, Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA, 2016, Refika Aditama, Bandung.
- www.bppt.go.id > Profil > Sejarah > Berita BPPT > Berita Layanan Info Publik
- Non Electronic Source:*
Gambaran Umum Kota Cimahi. www.cimahikota.go.id/
Kementerian Sosial dan POKJA, Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, 2016. Jakarta: Kemensos dan POKJA.
- Neuman, Lawrence W. 1991. Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaehes. New York: Allyn & Bacon A Viacom Company.
- O'Connor, Ian & Wilson, Jill & Setterlund, Deborah. 1995. Social Work and Welfare Practice. Melbourne: Longman Australia, Ltd.
- Pincus, Allen- Minahan, Anne. 1975: 90. Social Work Practice: Model and Method. Illinois: Peacock Publisher, Inc.
- Queralt, Magaly. 1996. The Social Environment and Human Behavior, a Diversity Perspective. London: Allyn and Bacon
- Sariningsih, Yuce. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Permodalan dan Pemasaran yang Berimplikasi pada Kinerja serta Dampaknya terhadap Kesejahteraan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Wanita di Jawa Barat.
- Tampubolon Joyakin, Sugihe Basita Ginting, Slamet Margono, Susanto Djoko dan Sumardjo, Jurnal Penyuluhan, Juni 2006, Vol. 2 No. 2
- Yasin, Jurnal Administrasi Publik, Juli 2015, Vol. 5 No. 1
- Zastrow, Charles. 2010. Introduction to Social Work and Social Welfare. Canada: Nelson Education.

Yuce-Sariningsih-UNPAS-Prosiding

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%

★ www.bantennews.co.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Yuce-Sariningsih-UNPAS-Prosiding

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
